



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id)

[email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 11 Maret 2025

Nomor : 000.3.1/3197/III/BPBJ-Setda/2025

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : **Undangan**

K e p a d a :

Yth. Undangan Terlampir  
di-

**Tempat**

Sesuai Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK  
Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Tanggal 30 Desember  
2024 Hal : Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi  
Daerah Tahun 2025 pada area Pengadaan Barang dan Jasa,  
Sasaran 2 : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis, dengan ini  
dimohon kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : J u m a t / 1 4 Maret 2025

Waktu : Pk. 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten  
Buleleng

Catatan : 1. Pembahasan penetapan Paket Strategis Tahun  
Anggaran 2025.  
2. Pembahasan tahapan pelaksanaan Paket  
Strategis Tahun Anggaran 2025 sesuai  
Pedoman IPKD MCP 2025.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan  
terima kasih.



**Tembusan Yth:**

1. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng ;
3. Arsip.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah  
Nomor : 000.3.1/3197/BPBJ-Setda/2025  
Tanggal : 11 Maret 2025

**Daftar Undangan :**

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Puskesmas Busungbiu II.

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah  
Nomor : 000.3.1/3197/III/BPBJ-Setda/2025  
Tanggal : 11 Maret 2025

**RENCANA PAKET STAREGIS TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Detail Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Volume	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengerasan jalan lingkari Turyapada Tower - Lemukih	Pegayaman - Lemukih	Sukasada - Sawan	1,7 KM	9.900.000.000,00	BKK Prov	Mendukung sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur publik
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Persampahan	Pengadaan 1 unit bulldozer, 2 unit arm roll single hidrolik + kontainer terbuka 6 m3, 2 unit kontainer	Kabupaten Buleleng	Semua Kecamatan	1 Paket	4.000.000.000,00	BKK Prov	Mendukung sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur publik
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah, Kedokteran Poliklinik, Kedokteran Radiodiagnostic, Kedokteran ICU	RSUD KAB.BULELENG	Buleleng	1 Paket	2.626.880.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	Mendukung sarana prasarana Rumah sakit



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus ( Ambulan Jenasah)	RSUD KAB.BULELENG	Buleleng	2 Unit	1.000.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mendukung sarana prasarana Rumah sakit
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	PUSKESMAS BUSUNGBIU II	Buleleng	1 Paket	390.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan	Mendukung sarana prasarana Puskesmas
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SD NEGERI 2 LILIGUNDI, NEGERI 2 UNGGAHAN, SD NEGERI 1 UNGGAHAN, SD NEGERI 4 DEPEHA, SD NEGERI 3 SEPANG, SD NEGERI 3 PEMUTERAN, SD NEGERI 3 GOBLEG	Buleleng	1 Paket	721.000.000,00	DAK FISIK	Peningkatan Kualitas Pendidikan
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)	SMP NEGERI 1 BUSUNGBIU SMP NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN SMP NEGERI 2 BUSUNGBIU SMP NEGERI 2 GEROKGAK	Busungbiu	1 Paket	228.798.084,00	DAK FISIK	Peningkatan Kualitas Pendidikan

8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Revitalisasi PauD (Pengadaan APE dalam ruang)	10 Lembaga PAUD	Kecamatan di Kab. Buleleng	1 Paket	500.000.000,00	DAK FISIK	Peningkatan Kualitas Pendidikan
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemberian Bantuan Tas, Sepatu dan Kaos Kaki untuk siswa TK, seragam merah putih, seragam pramuka, tas sepatu dan kaos kaki bagi siswa SD, Pemberian Pakaian Seragam biru putih, pramuka, tas, sepatu dan kaos kaki	TK di Kab. Buleleng	9 Kecamatan	5100 Siswa	5.614.860.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Mendukung dalam upaya peningkatan partisipasi sekolah

Lampiran III Surat Sekretaris Daerah  
Nomor : 000.3.1/3197/III/BPBJ-  
Setda/2025  
Tanggal : 11 Maret 2025

**CHECK LIST**  
**PEDOMAN INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI (IPKD)**  
**MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)**  
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**Sasaran 2 : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis**

No.	Pelaksanaan	PENANGGUNG JAWAB	Keterangan
1.	Pemda sudah mempublikasikan PBJ Strategis Pemda tahun 2025 pada SIRUP dalam website pemda maksimal 31 Maret – nilai 100	Sekda, Bappeda, BPKD, Diskominfo, UKPBJ	
2.	Pemda sudah memiliki SK Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025 maksimal 31 Maret 2025 – nilai 100	Sekda, Bappeda, BPKD, Biro/ Bagian Hukum	
3.	5 PBJ Strategis telah dilengkapi dengan RK BMD – nilai 25	Sekda, BPKD, Perang	
4.	5 PBJ Strategis telah dilengkapi dengan dokumen perizinan sesuai ketentuan perizinan – nilai 25	Sekda, BPKD, Perang	
5.	PBJ strategis telah sesuai dengan RPJMD dan RKPD – nilai 25	Sekda, BPKD, Perang	
6.	5 PBJ strategis telah sesuai dengan hasil studi kelayakan– nilai 25	Sekda, BPKD, Perang	
7.	Penetapan Pemenang PBJ Strategis Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui LPSE – nilai 25	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah Terkait	
8.	Dokumen hasil reuiu HPS oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK pada 5 PBJ strategis Tahun 2025 jika dilakukan melalui tender– nilai 75	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah Terkait	
9.	Dokumen hasil reuiu kertas kerja referensi harga oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025 jika dilakukan secara <i>epurchasing</i> – nilai 75	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah Terkait	
10.	notulensi pembahasan rancangan kontrak 5 PBJ Strategis Tahun 2025 turut ditandatangani oleh Inspektorat, Biro Hukum, dan UKPBJ – nilai 15.	Sekda, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, UKPBJ dan Perangkat Daerah terkait	
11.	notulensi pembahasan/ bedah kontrak 5 PBJ Strategis Tahun 2025 ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama penyedia – nilai 15.	Sekda, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, UKPBJ dan Perangkat Daerah terkait	

12.	tersedia kontrak 5 PBJ Strategis Tahun 2025 – nilai 20	Sekda, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, UKPBJ dan Perangkat Daerah terkait	
13.	tersedia Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025 – nilai 20	Sekda, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, UKPBJ dan Perangkat Daerah terkait	
14.	rekomendasi pada 5 <i>probity audit</i> PBJ Strategis seluruhnya telah ditindaklanjuti – nilai 30.	Sekda, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, UKPBJ dan Perangkat Daerah terkait	
15.	Daftar risiko ( <i>Risk Register</i> ) korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis beserta tingkat prioritasnya – nilai 10.	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	
16.	Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis – nilai 10.	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	
17.	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis yang telah dievaluasi 3 Lini – nilai 10.	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	
18.	<b>Hasil <i>Quality Assurance</i> terhadap pelaksanaan PBJ Strategis - nilai 70.</b> Hasil Pengujian/ <i>Quality Assurance</i> terhadap pengendalian pelaksanaan PBJ Strategis dilakukan oleh <b>KPK, Kemendagri, dan BPKP.</b>	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	
19.	Dokumen bukti pelaksanaan publikasi dan laporan sosialisasi atas PBJ tahun 2025 yang dilaksanakan melalui <i>epurchasing</i> (secara <i>online</i> ) – nilai 50.	Sekda, UKPBJ, Dinas yang membawahi komunikasi dan informasi Pemda	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
20.	Dokumen bukti pelaksanaan publikasi dan sosialisasi atas PBJ Tahun 2025 yang telah dilaksanakan melalui <i>epurchasing</i> (secara <i>offline</i> ) – nilai 50.	Sekda, UKPBJ, Dinas yang membawahi komunikasi dan informasi Pemda	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
21.	SK Pembentukan Tim Teknis <i>ePurchasing</i> yang bertugas untuk membantu PPK, ditetapkan oleh KPA - nilai 50	Sekda, UKPBJ, Biro/Bagian Hukum,	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>



22.	Laporan pelaksanaan <i>market sounding</i> dan <i>market confirmation</i> untuk proyek yang dilaksanakan melalui <i>epurchasing</i> tahun 2025 pada 3 OPD Strategis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) – nilai 60.	Sekda, BPKAD, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
23.	Laporan pelaksanaan bimbingan teknis tentang teknik negosiasi dalam <i>e-purchasing</i> bagi seluruh PPK dan PP tahun 2025 pada 3 OPD Strategis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) – nilai 40.	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
24.	PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja berisi tentang Rencana Perkiraan Anggaran Biaya – nilai 20.	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
25.	PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja berisi tentang Evaluasi/ Reviu spesifikasi teknis - nilai 20	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
26.	PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja yang berisi tentang pengumpulan referensi harga dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya - nilai 20	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
27.	Jika PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja yang berisi tentang evaluasi/ reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) - nilai 20	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
28.	Jika PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja yang berisi tentang evaluasi/ reviu terhadap Rencana Metode Pemilihan - nilai 20.	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>



29.	pemilihan penyedia untuk PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah tersedia minimal 5 penyedia nilai 20.	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
30.	pemilihan penyedia telah menunjukkan tahapan pelaksanaan dan evaluasi kewajaran harga - nilai 20	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
31.	tersedia <i>Screenshoot</i> etalase Penyedia di <i>e-catalogue</i> (minimal 3 penyedia). Untuk 5 paket non konstruksi pada 3 OPD – nilai 20.	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
32.	Jika seluruh PBJ melalui <i>epurchasing</i> dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia yang memuat antara lain data umum pekerjaan, item pekerjaan, perbandingan masingmasing calon penyedia dari sisi teknis, harga, maupun fasilitas lainnya yang mampu disediakan, dan verifikasi penyedia jasa (memenuhi/ tidak memenuhi) nilai - 40.	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
33.	Jika seluruh pengadaan melalui <i>e-purchasing</i> telah sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan di awal (spesifikasi teknis), dibuktikan dengan kertas kerja - nilai 100.	Sekda, UKPBJ, OPD terkait	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
34.	Daftar risiko ( <i>Risk Register</i> ) korupsi pelaksanaan <i>ePurchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan beserta tingkat prioritasnya – nilai 10.	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
35.	Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan – nilai 10.	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>

36.	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan yang telah dievaluasi 3 Lini – nilai 10.	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>
37.	<b>Hasil <i>Quality Assurance</i> terhadap pengendalian pengesahan APBD Murni Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025 - nilai 70.</b>  Catatan: Hasil Pengujian/ <i>Quality Assurance</i> terhadap pengendalian pengesahan APBD Murni Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025 dilakukan oleh <b>KPK, Kemendagri, dan BPKP.</b>	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	<i>Paket Strategis non Konstruksi dengan e-Purchasing sekaligus pemenuhan Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)</i>